

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

I Made Yoga Darma Putra¹
Ni Ketut Rasmini²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: yogadarma86@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas pengelolaan dana desa diperlukan untuk dapat menjalankan pemerintahan desa dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Sampel penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

The effectiveness of managing village funds is necessary to be able to run the village government well. Factors that influence the effectiveness of village fund management including accountability, transparency, and community participation. This study aims to determine the effect of accountability, transparency, and community participation on the effectiveness of village fund management in the Abiansemal District of Badung Regency. The sample of this study was 18 villages in Abiansemal Subdistrict with 72 respondents. The sample selection method used a purposive sampling method, data was collected using a questionnaire. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that accountability, transparency, and community participation have a positive effect on the effectiveness of village fund management in the Abiansemal District of Badung Regency. This shows that the better the accountability, transparency, and community participation, the better the management of village funds in Abiansemal Subdistrict, Badung Regency.

Keywords: *Accountability, transparency, community participation, effectiveness of village fund management.*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik

bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih

menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Rincian dari dana desa untuk Provinsi Bali tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Daftar Rincian Dana Desa untuk Provinsi Bali Tahun 2017
(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per Desa	Per Kab/Kota		
1	Badung	46	720.442	33.140	7.175	40.315
2	Bangli	68	720.442	48.990	6.793	55.783
3	Buleleng	129	720.442	92.937	12.923	105.860
4	Gianyar	64	720.442	46.108	9.645	55.753
5	Jembrana	41	720.442	29.538	6.937	36.475
6	Karangasem	75	720.442	54.033	9.649	63.682
7	Klungkung	53	720.442	38.183	6.356	44.540
8	Tabanan	133	720.442	95.818	10.599	106.417
9	Denpasar	27	720.442	19.451	8.976	28.428

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017

Pengalokasian dana desa untuk tiap desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggir. Hal ini demi

untuk meningkatkan pembangunan desa-desa di Indonesia yang hingga saat ini masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Terkait pengelolaan Dana Desa, Menteri Eko menegaskan bahwa ia optimis akan transparansi dan pengawasan dana tersebut. “Dana Desa ini sangat transparan sekali. Tiga kementerian juga membentuk satuan tugas untuk mengawasi Dana Desa ini, yaitu Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga diawasi oleh BPK, KPK, BPKP, NGO, dan lainnya.”Apalagi, lanjutnya, jika peran masyarakat untuk mengawasi juga ditingkatkan. Untuk hal ini, ia berharap media dapat turut serta membantu meningkatkan *awareness* masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut (Kominfo.go.id, 2017).

Kabupaten Badung memiliki 6 Kecamatan, yaitu Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan jumlah desa terkecil no 3 di Bali dengan 46 desa dan hanya mendapatkan dana desa Rp 40.315.000.000,00 namun tetap saja terdapat laporan tentang dugaan “korupsi” dana desa di Badung, laporan ini muncul saat acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Minggu (22/10) pagi. Kadis Pemerintahan Desa (Pemdes) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, yang baru turun dari berorasi di PB3AS didatangi seorang warga asal Kecamatan Abiansemal, Badung, kepada Ketut Lihadnyana, warga tersebut mengatakan ada dugaan penyelewengan dana desa di salah satu desa kawasan Kecamatan Abiansemal. Penyelewengan dana desa ditengarai sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu, namun hingga kini tidak

mendapatkan atensi dari pihak berwajib (www.nusabali.com, 2017). Kecamatan Abiansemal memiliki 18 desa, yaitu Abiansemal, Angantaka, Ayunan, Blahkiuh, Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, Darmasaba, Dauh Yeh Cani, Jagapati, Mambal, Mekar Bhuwana, Punggul, Sangeh, Sedang, Selat, Sibang Gede, Sibang Kaja, dan Taman. Dugaan korupsi di Kecamatan Abiansemal tentu menjadi suatu masalah yang serius dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat agar masalah serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Good governance menurut Muindro (2013;121) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan *good governance* memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa

dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staff untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada pengelolaan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasno, 2002).

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan

pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Scott, 2000: Mulgan, 2003) dalam (Mahayani, 2017). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Patton, 1992) dalam (Mahayani, 2017).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah

mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2017) yang hanya menggunakan 2 variabel yaitu transparansi dan akuntabilitas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemilihan variabel partisipasi masyarakat dikarenakan dengan adanya partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi lebih efektif.

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk diantaranya pemerintahan desa adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik

secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi (Mahmudi, 2007).

Hasil penelitian Jurniadi, Djumadi, & Paranoan (2004) menunjukkan Akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian Dura (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga didapatkan dari penelitian Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa

Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana *principal* tidak memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi *principal* dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari.

Tranparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2002). Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami & Nurodin, 2017).

Hasil penelitian Jurniadi *et al.* (2004) menunjukkan Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian Umami & Nurodin (2017) menyatakan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *agency theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk

memusyawartkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil penelitian Jurniadi *et al.* (2004) menunjukkan Partisipatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian Mada (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal yang berjumlah 18 desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di 18 desa yang berada di Kecamatan Abiansemal. Banyaknya populasi dari 18 desa yang berada di Kecamatan Abiansemal adalah sebanyak 396 perangkat desa.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan bertujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Efektivitas pengelolaan dana desa
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi akuntabilitas
- β_2 = Koefisien regresi transparansi
- β_3 = Koefisien regresi partisipasi masyarakat
- X_1 = Akuntabilitas
- X_2 = Transparansi
- X_3 = Partisipasi masyarakat
- e = Error term (Variabel pengganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel dari penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 72 dengan karakteristik seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	
		Orang	Persentase (%)
	Berdasarkan Jenis Kelamin		
1	Laki-laki	51	70,83
2	Perempuan	21	29,17
	Jumlah	72	100
	Pendidikan Terakhir		
1	SMA	32	44,44
2	Diploma	8	11,11
3	S1	31	43,06
4	S2	1	1,39
	Jumlah	72	100
	Berdasarkan Masa/Lama Bekerja di Desa		
1	1-5 tahun	35	48,61
2	6-10 tahun	14	19,44
3	11-15 tahun	5	6,94
4	>15 tahun	18	25
	Jumlah	72	100

Sumber: Data diolah, 2018

Jenis kelamin responden dapat mempengaruhi emosi untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perorangan. Berdasarkan Tabel 3 dapat

dilihat bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi adalah laki-laki yaitu sebesar 70,83 persen sedangkan perempuan sebesar 29,17 persen.

Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan bagaimana orang tersebut dalam menempati posisi pada suatu instansi pemerintahan agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden adalah S2 sebesar 1,39 persen, S1 sebesar 43,06 persen, Diploma sebesar 11,11 persen dan SMA sebesar 44,44 persen.

Lama bekerja responden digunakan untuk mengetahui pengalaman kerja responden sehingga diharapkan mampu mengenal instansi tempat responden itu bekerja. Tabel 3 dapat dilihat bahwa lama bekerja responden adalah 1-5 tahun sebesar 48,61 persen, 6-10 tahun sebesar 19,44 persen, 11-15 tahun sebesar 6,94 persen dan >15 tahun sebesar 25 persen.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, rata-rata, simpangan baku (*standar deviasi*) dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X ₁)	72	30	60	52,93	5,663
Ttansparansi (X ₂)	72	28	47	38,43	4,301
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	72	43	82	54,92	7,294
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	72	33	48	42,53	3,968

Sumber: Data diolah, 2018

Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 60. Nilai rata-rata untuk variabel akuntabilitas adalah 52,93 dengan penyimpangan sebesar 5,663. Variabel transparansi memiliki nilai minimum sebesar 28 dan nilai maksimum sebesar 47. Nilai rata-rata untuk variabel transparansi adalah 38,43 dengan nilai penyimpangan 4,301. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum sebesar 43 dan nilai maksimum sebesar 82. Nilai rata-rata untuk variabel partisipasi masyarakat adalah 54,92 dengan nilai penyimpangan 7,294. Variabel efektivitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 48. Nilai rata-rata untuk variabel efektivitas pengelolaan dana desa adalah 42,53 dengan nilai penyimpangan 3,968.

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistic *kolmogorov-smirnov*. Apabila *Asymp. Sig (2 tailed) > α (0,05)* maka dikatakan data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas *Kolmogorow-Smirnov Test* disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov Test*)

	<i>Unstandardizer Residual</i>
N	72
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,074
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa setelah dilakukan tranformasi data maka hasil dari tes statistik menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* diatas 0,05. Hasil uji normalitas dengan model regresi menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga dikatakan layak untuk diuji.

Pedoman untuk mengetahui apakah variabel bebas yang lain tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila mempunyai nilai VIF (*Variances Inflation Factor*) yang kurang dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Akuntabilitas	0,678	1,476
Transparansi	0,647	1,546
Partisipasi Masyarakat	0,862	1,160

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji *Glejser*

Variabel	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	0,458	Bebas Heteroskedastisitas
Transparansi	0,573	Bebas Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	0,858	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, maka selanjutnya memaparkan hasil analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3) pada efektivitas pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Perhitungan koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan analisis regresi melalui *software SPSS 24 for Windows*, diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Beta</i>	<i>Std. Error</i>	T hitung	Sig. uji t
<i>Constant</i>	10,771	3,600	2,992	0,004
Akuntabilitas (X_1)	0,273	0,069	3,945	0,000
Ttransparansi (X_2)	0,373	0,093	4,006	0,000
Partisipasi Masyarakat (X_3)	0,055	0,048	1,147	0,255

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 8, maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 10,771 + 0,273X_1 + 0,373X_2 + 0,055X_3 + e$$

Nilai konstanta (α) sebesar 10,771 memiliki arti jika variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dinyatakan konstan pada angka 0, maka nilai tingkat efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 10,771.

Koefisien regresi β_1 sebesar 0,273 memiliki arti bahwa jika variabel akuntabilitas meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada tingkat efektivitas pengelolaan dana desa, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Koefisien regresi β_2 sebesar 0,373 memiliki arti bahwa jika variabel transparansi meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada tingkat efektivitas pengelolaan dana desa, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Koefisien regresi β_3 sebesar 0,055 memiliki arti bahwa jika variabel partisipasi masyarakat meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada tingkat efektivitas pengelolaan dana desa, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) berpengaruh pada variabel terikat (efektivitas pengelolaan dana desa). Dalam penelitian ini apabila hasil dari Uji F menyatakan signifikan F atau *P value* < 0,05 maka hubungan antar variabel-variabel bebas adalah signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Hasil uji simultan/uji F akan disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	617,174	3	205,725	27,936	0,000
	Residual	500,770	68	7,364		
	Total	1117,944	71			

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 5 persen ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti variabel

bebas berpengaruh secara serempak pada variabel terikat pada tingkat signifikansi 5 persen.

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen dalam menerangkan variansi variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai dari *adjusted R²* karena apabila suatu variabel ditamah ke model dan hasilnya tidak signifikan, maka akan mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,743	0,552	0,532	2,714

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* adalah 0,532 atau 53,2 persen, ini artinya variasi efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sisanya sebesar 46,8 persen dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji t disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11.
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	T hitung	Sig. uji t
(<i>Constant</i>)	2,992	0,004
Akuntabilitas	3,945	0,000
Transparansi	4,006	0,000
Partisipasi Masyarakat	1,147	0,255

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 11, penjabaran dari hasil uji hipotesis (uji t) penelitian ini adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 11 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,945. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,000 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas akuntabilitas yang ada di pemerintahan desa, maka efektivitas pengelolaan dana desa akan cenderung semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 11 menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,006. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,000 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus transparansi di pemerintahan desa maka efektivitas pengelolaan dana desa akan cenderung semakin bagus.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 11 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi 0,255 dengan nilai t_{hitung} 1,147. Nilai signifikansi 0,255 lebih besar dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 5 persen atau 0,05 ($0,255 > 0,05$) mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, maka efektivitas pengelolaan dana desa cenderung tidak mengalami peningkatan.

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal*

(masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi.

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,273 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi positif menunjukkan hubungan yang searah antara akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin baik akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka efektivitas pengelolaan dana desa cenderung akan semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jurniadi *et al.* (2004), Dura (2016), Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana *principal* tidak memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi *principal*

dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari.

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,373 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi positif menunjukkan hubungan yang searah antara transparansi dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jurniadi *et al.* (2004), Umami & Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *agency theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*. Penelitian Sigit (2013) menyatakan bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu tingkat partisipasi adalah *consultation* yaitu masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga

diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,055 dengan nilai signifikansi sebesar 0,255 yang lebih besar dari 0,05 ($0,255 > 0,05$). Nilai koefisien regresi positif menunjukkan hubungan yang searah antara partisipasi masyarakat dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jurniadi *et al.* (2004) dan Mada (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada variabel dependen yaitu efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mendukung *agency theory* yaitu kontrak kerja antara perangkat desa (*agent*) dengan masyarakat desa (*principal*) dalam pemerintah desa, kepala desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Variabel akuntabilitas dan transparansi menjelaskan perangkat desa yang bertindak sebagai *agent* sedangkan variabel partisipasi masyarakat menjelaskan peranan masyarakat desa sebagai *principal*. Penelitian ini juga mendukung teori *good government governance* dimana dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dengan rakyatnya. *Good government governance* dapat dicapai apabila akuntabilitas dan transparansi dapat dijalankan dengan baik oleh perangkat desa, serta adanya partisipasi dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja perangkat desa.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi perangkat desa untuk dapat mempublikasikan akuntabilitas dari suatu kegiatan desa dan menjadi lebih transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pemerintahan desa. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan pada penggunaan dana desa.

SIMPULAN

Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa.

Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa cenderung tidak akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini menggunakan sampel semua desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal, penelitian ini selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel desa yang ada di Kabupaten Badung agar diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti sistem pelaporan dan kejelasan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini diperuntukkan agar hasil dari penelitian berikutnya dapat digunakan secara lebih luas.

Bagi masyarakat disarankan untuk lebih ikut berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBDes dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Bagi perangkat desa disarankan untuk lebih melakukan penghematan dalam penggunaan dana desa, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Perangkat desa juga diharapkan lebih transparan dalam mengumumkan kebijakan yang dibuat berhubungan dengan

pengelolaan dana desa, seperti pengumuman kebijakan yang lebih rinci dan disampaikan pada saat rapat atau forum desa.

REFERENSI

- Aucoin, P., & Heintman, R. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1), 45-55.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada 21 September 2018.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10(1), 26–32.
- Jurniadi, Djumadi, & Paranoan, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, 1–13.
- Kenis, I. (1979). Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir, 1–10.
- Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Melalui Nawacita, Pemerintah Berkomitmen Bangun Desa. kominfo.go.id. Diakses pada 28 November 2018.
- Mada, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144.

- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasno. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muindro, R. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal.*, ISSN 2252-(Universitas Negeri Semarang).
- Nusa Bali. (2017). Muncul Laporan Korupsi Dana Desa. www.nusabali.com. Diakses pada 2 Oktober 2018.
- Rahayu, S. (2010). Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Journal Unja*.
- Sigit, W. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman. *Jurnal ComTech*, 4(1).
- Sukhemi. (2010). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen.*: 286-293.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-6969.
- Utami, K., & Efrizal, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*, 1(1).